



Modul
Analisis Kebijakan Kesehatan (KAK 471)

Materi 12
Konsep Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Disusun Oleh:
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.

Universitas
Esa Unggul

Universitas Esa Unggul

2020

MODUL 12

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep implementasi kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan., terdiri dari beberapa subbagian yaitu:

1. Konsep Implementasi Kebijakan
2. Monitoring Kebijakan Publik
3. Evaluasi

B. Uraian dan Contoh

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Didalam Implementasi kebijakan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai cara dalam mengimplementasikannya sebagaimana yang diungkapkan Mazmanian dan Sabatier (1983:61) dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah :

”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran

yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Untuk dapat melukiskan kerumitan dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari definisi implementasi kebijakan yang berbeda diungkapkan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, sebagai :

” Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang”.

Pendapat lain mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh kelompok pemerintah maupun swasta agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai sebagaimana diungkapkan oleh Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) :

” Implementasi kebijakan ialah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep..

1.1 Fokus Utama Analisis Implementasi Kebijakan

Keberhasilan analisis implementasi kebijakan, antara lain ditentukan oleh ketajaman menetapkan focus, permasalahan atau pertanyaan utama (*subject*

matter) . Salah satunya disampaikan oleh O'Toole, yang mengidentifikasi fokus atau pertanyaan utama dalam analisis implementasi adalah “Apa yang terjadi antara lahirnya suatu kebijakan dan bagaimana dampaknya terhadap dunia?” (O'Toole 2000:273).

Fokus atau permasalahan utama analisis implementasi kebijakan, seperti (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk memetakan faktor apa saja (variabel penjeleas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tersebut.

Adapun beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, yakni

1. *Output*, digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari implementasi kebijakan.
2. Akses, seberapa mudah kelompok sasaran mendapat layanan dari implementasi sebuah kebijakan
3. Cakupan, siapa yang menjadi kelompok sasaran dan perbandingan jumlah kelompok sasaran yang telah mendapatkan layanan dengan total kelompok sasaran. Dapat pula menganalisis frekuensi untuk mengetahui seberapa sering kelompok sasaran memperoleh layanan kebijakan.
4. Bias, menganalisis potensi terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan implementasi kebijakan.
5. Ketepatan layanan, berkaitan dengan ketepatan waktu layanan.
6. Akuntabilitas, merupakan aspek pertanggungjawaban implementasi
7. Kesesuaian program dan kebutuhan.

8. *Outcome*, untuk mengukur dampak suatu kebijakan.

Seorang analis kebijakan harus mampu mengenali dan tanggap menganalisis implementasi yang rawan menghadapi permasalahan dalam prosesnya. Kebijakan-kebijakan yang cenderung memunculkan masalah dalam implementasi antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Baru

Kebijakan baru cenderung mengalami kendala dalam hal implementasi. Banyak hal yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan baru. Hal-hal seperti, kendala komunikasi, tujuan kebijakan yang belum jelas, ketidakkonsistenan petunjuk pelaksanaan, kekurangan sumber dana, bukan merupakan sebuah prioritas dan sebagainya.

2. Kebijakan yang didesentralisasikan

Berkaitan dengan banyak pihak yang terlibat yang membuat panjang rantai birokrasi.

3. Kebijakan kontroversial

Kebijakan yang lahir dari pro-kontra yang besar membuat proses pengimplementasian memerlukan kompromi yang besar.

4. Kebijakan yang kompleks

Kebijakan yang rumit menimbulkan kesulitan penerapan oleh pelaksana

5. Kebijakan yang berhubungan dengan krisis

Keadaan krisis sering meminta tindakan yang cepat dan fleksibel yang memungkinkan munculnya potensi penolakan

6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan

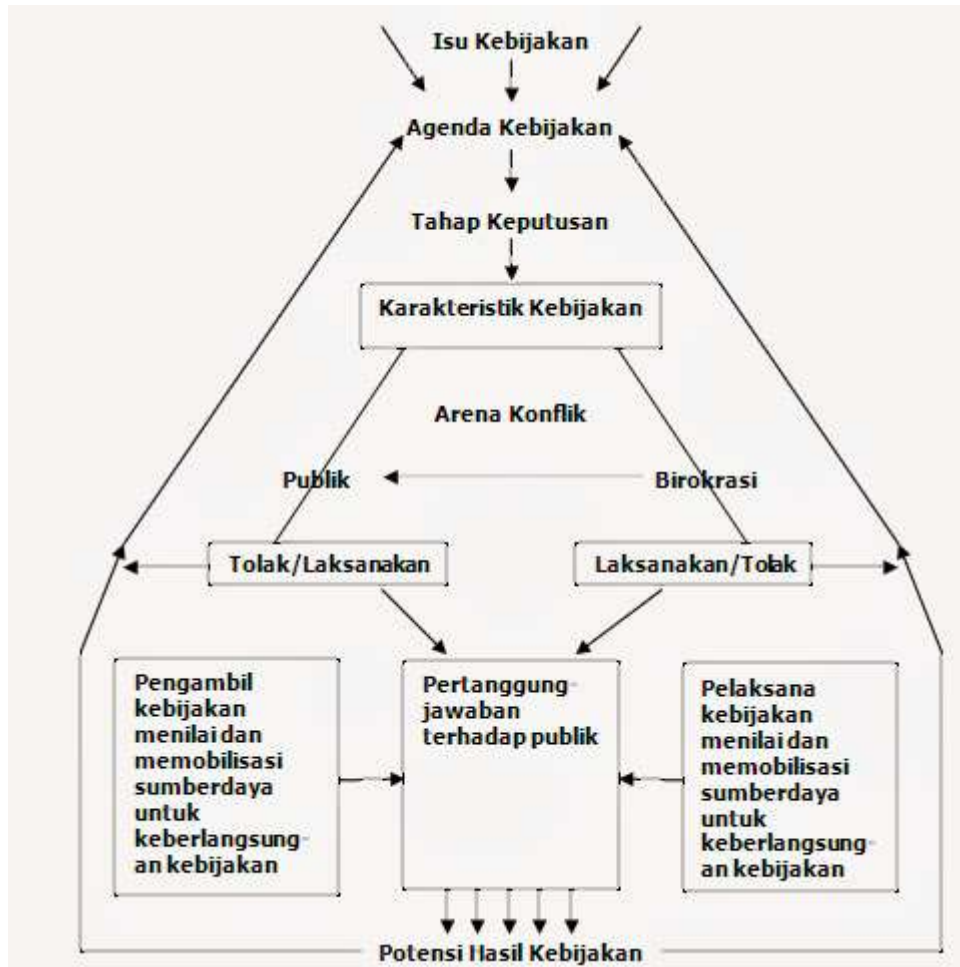
Keputusan pengadilan seringkali berupa pernyataan-pernyataan yang normative yang membutuhkan interpretasi lebih

1.2 Model Analisis Implementasi Kebijakan

1.2.1 Model Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.





1.2.2. Model Edward III

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

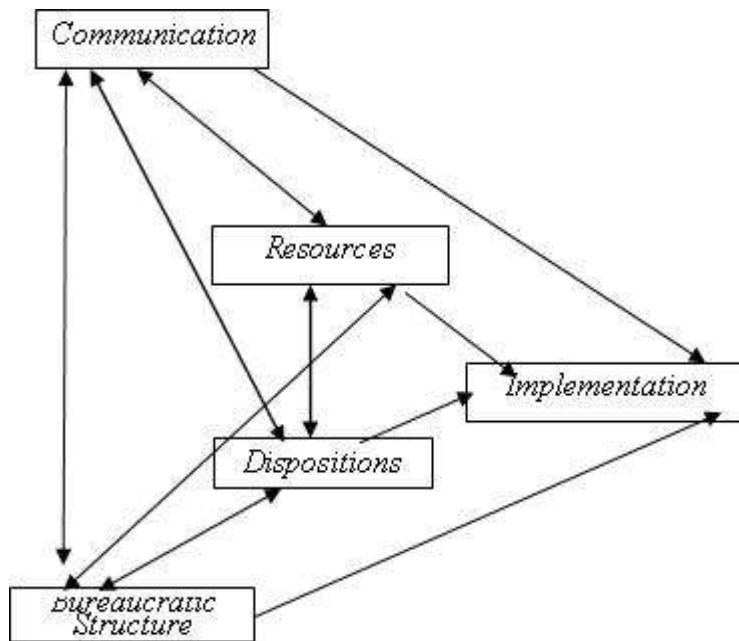
c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

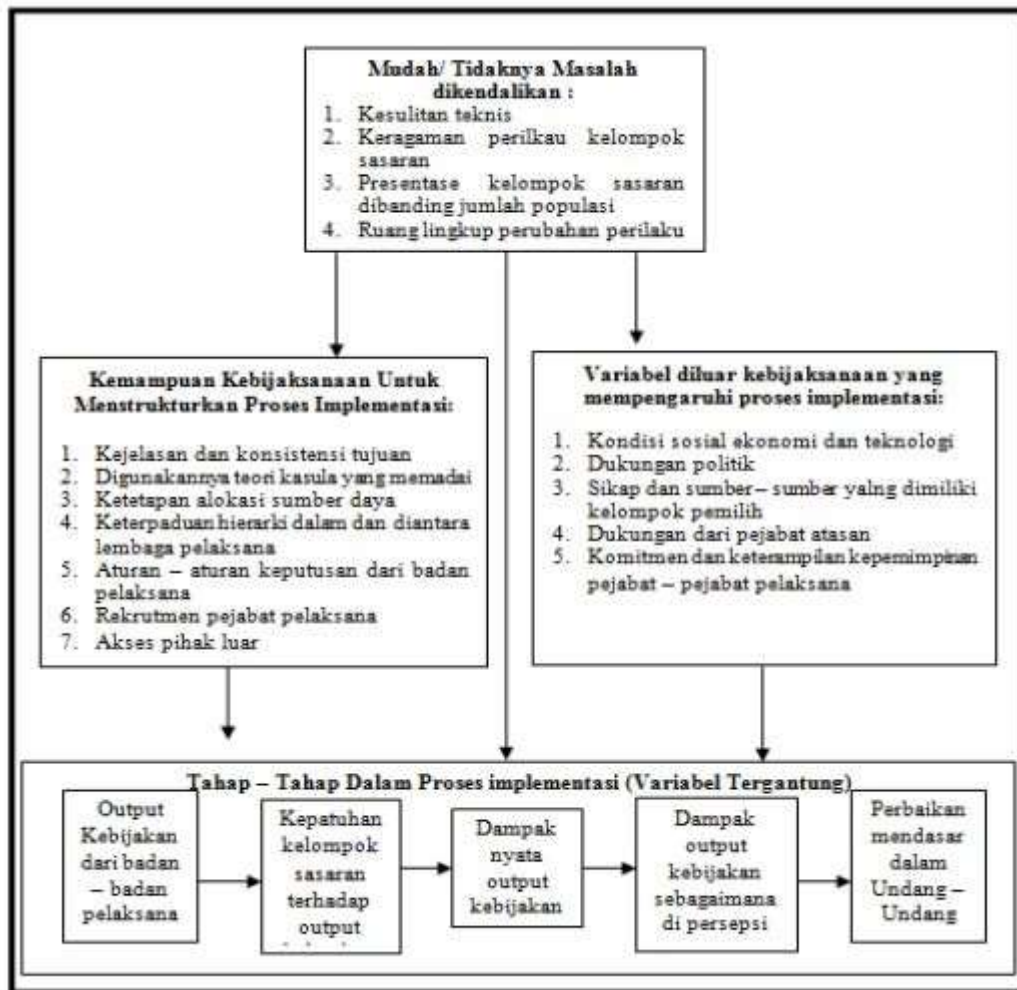
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.



1.2.3. Model Mazmanian dan Sabatier

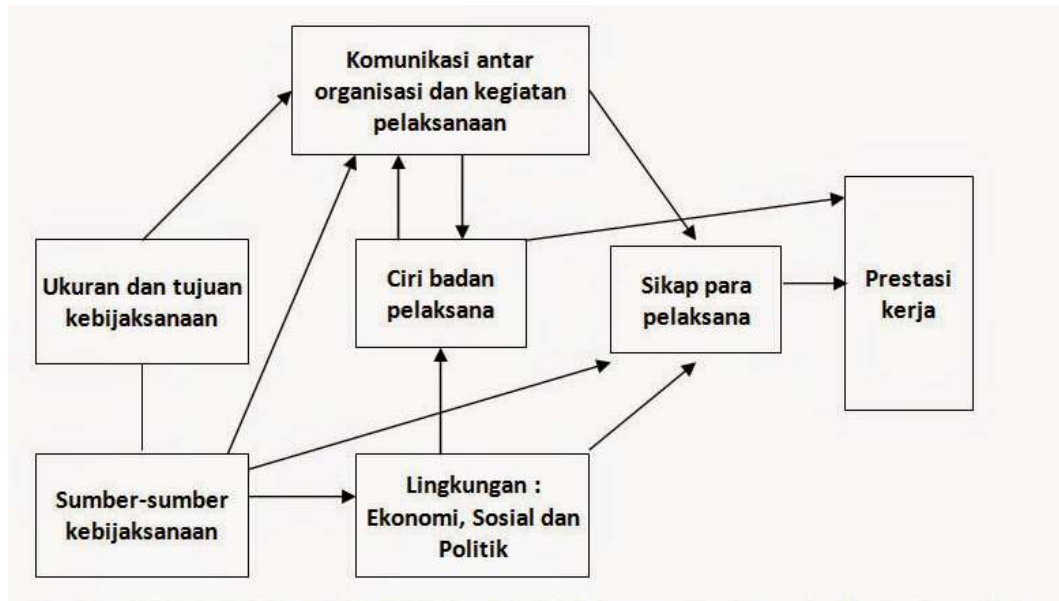
Pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang dituangkan dalam tulisan mereka yang berjudul: *A Frame Work for Implementations Analysis* (1983) bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keseluruhan proses implementasi selanjutnya diklasifikasi oleh Mazmanian dan Sabatier (1983: 21-30) dalam tiga variabel sebagai berikut: “1. *Tractability of the problems*; 2) *Ability of policy decision to structure implementation*; and 3) *Nonstatury variable affecting implementation*”.

Berikut ini digambarkan kerangka pemikiran Mazmanian dan Sabatier (1983: 22) tentang implementasi kebijakan.



1.2.4. Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor. Seperti yang terlihat pada gambar



1.2.5. Model Hogwood and Gunn

Model yang dikembangkan Hogwood dan Gunn (2004) yang dikenal sebagai top down approach, antara lain: (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan /kendala yang serius; (2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; (4) kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil; (7) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (8) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan (9) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

1.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.
- Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

2. Monitoring Kebijakan Publik

2.1 Monitoring

- Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
- Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan.
- Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

2.2 Tujuan monitoring:

- Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

- Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
- Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

2.3 Data dan Informasi untuk monitoring:

- Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
- Metode survei: tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran.
- Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.
- Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.
- Metode campuran: misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas
- Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross check data dan informasi dari berbagai sumber.

2.4 Jenis-jenis Monitoring:

- Kepatuhan (compliance): jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Pemeriksaan (auditing): jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
- Akuntansi (accounting): jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
- Eksplanasi (explanation): jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

2.5 Pendekatan terhadap Monitoring:

- Akuntansi sistem sosial: pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
- Eksperimental sosial: pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol.
- Akuntansi sosial: pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak.
- Sintesis riset dan praktek: pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

3.1 Tujuan Evaluasi

- Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

- Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3.2 Alasan Evaluasi Kebijakan

- Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan: seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
- Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal: dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- Memenuhi akuntabilitas publik: dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
- Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan: apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama: evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3.3 Pendekatan evaluasi

- Evaluasi Semu: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
- Evaluasi formal: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
- Evaluasi keputusan teoritis: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

3.4 Indikator Evaluasi

- Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
- Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
- Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
- Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

3.5 Metode Evaluasi

- Single program after-only: pengukuran kondisi dilakukan sesudah program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran.
- Single program before-after: pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran.
- Comparative after-only: pengukuran kondisi dilakukan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol.
- Comparative before-after: pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol.

3.6 Kendala Evaluasi

- Kendala psikologis: banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.
- Kendala ekonomis: kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk para evaluator.
- Kendala teknis: evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.
- Kendala politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik tertentu.

C. Latihan

1. Jelaskan Model Implementasi Kebijakan Model Hogwood and Gunn
2. Sebutkan Tujuan monitoring
3. Jelaskan Kendala Evaluasi Kebijakan

D. Kunci Jawaban

1 Model yang dikembangkan Hogwood dan Gunn (2004) yang dikenal sebagai top down approach, antara lain: (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan /kendala yang serius; (2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; (4) kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil; (7) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (8) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan (9) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

2. Tujuan monitoring

- Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
- Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

3. Kendala Evaluasi kebijakan

- Kendala psikologis: banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.
- Kendala ekonomis: kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk para evaluator.
- Kendala teknis: evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.
- Kendala politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik tertentu.

E. Daftar Pustaka

- 1) Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- 2) Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2018. Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- 3) Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.